

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas punk di Kota Bandung menjalankan bentuk partisipasi politik non-konvensional sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil dan tidak partisipatif. Bentuk partisipasi yang dimaksud tidak melalui kanal formal-institusional, melainkan diwujudkan melalui medium-medium budaya seperti musik punk, mural, grafiti, zine, booklet, simbol visual dan aksi sosial seperti pasar gratis. Ekspresi-ekspresi tersebut digunakan sebagai alat kritik politik terhadap kebijakan yang berdampak negatif terhadap masyarakat miskin kota seperti penggusuran paksa, pengelolaan ruang kota yang eksklusif, hingga regulasi nasional seperti Omnibus Law. Partisipasi politik ini dilakukan dengan cara-cara yang kreatif, otonom dan berbasis pada nilai-nilai kesetaraan, keadilan dan solidaritas.

Motivasi utama partisipasi komunitas punk berakar dari ketidakpuasan terhadap sistem politik formal yang dianggap tertutup dan tidak memberi ruang kepada suara kelompok marginal. Di sisi lain, dorongan personal seperti kebutuhan untuk didengar, membangun solidaritas sesama kelas tertindas serta pembentukan identitas politik alternatif menjadi pendorong yang kuat. Dalam kerangka ini, komunitas punk memaknai partisipasi bukan sekadar bentuk perlawanan tetapi sebagai bentuk peran warga negara kritis yang mengambil posisi politik secara sadar terhadap situasi ketimpangan dan ketidakadilan kebijakan. Melalui produksi simbolik dan ruang publik alternatif, komunitas ini turut memperluas horizon demokrasi dan memperlihatkan bahwa tindakan kritik adalah bagian dari kepedulian sosial.

Dalam prosesnya, komunitas punk menghadapi berbagai hambatan baik eksternal maupun internal. Hambatan eksternal meliputi represi dan pembatasan dari aparat serta stigma sosial terhadap identitas punk yang turut mempersempit ruang gerak politik mereka. Hambatan internal berupa perbedaan strategi gerakan,

Iis Masitoh, 2025

PARTISIPASI POLITIK KOMUNITAS PUNK DALAM MENYUARAKAN KRITIK TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH (STUDI FENOMENOLOGI DI KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

keterbatasan logistik serta ketegangan antarindividu dalam komunitas juga menjadi tantangan tersendiri. Namun demikian, komunitas punk menunjukkan ketangguhan melalui solidaritas kolektif, strategi adaptif dan penggunaan kreativitas sebagai modal resistensi.

Dampak partisipasi politik komunitas punk tampak pada penguatan kesadaran politik anggotanya, terbentuknya ruang-ruang diskusi alternatif serta keterlibatan dalam proses pendidikan politik berbasis akar rumput. Melalui aksi dan budaya tandingan, komunitas ini berperan sebagai aktor politik yang mengintervensi ruang publik dan menantang narasi kebijakan resmi yang dirasa menindas. Mereka tidak sekadar "melawan", tetapi turut menyuarakan harapan akan tatanan demokrasi yang lebih inklusif, adil dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, komunitas punk patut dipahami sebagai warga negara kritis yang berkontribusi terhadap perluasan makna partisipasi politik dan demokrasi dalam konteks Indonesia kontemporer.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan tersebut, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Komunitas Punk:

Komunitas punk diharapkan dapat terus mengembangkan bentuk-bentuk partisipasi politik non-konvensional yang kreatif dan inklusif serta menjaga solidaritas internal guna memperkuat perjuangan sosial-politik mereka. Perlu juga mengoptimalkan pemanfaatan media alternatif dan ruang digital untuk memperluas jangkauan pengaruh dan advokasi mereka.

2. Untuk Pemerintah dan Pemerhati Sosial:

Pemerintah dan pihak terkait hendaknya memberikan ruang yang lebih terbuka dan inklusif bagi komunitas marginal seperti punk untuk mengekspresikan aspirasi politik dan sosial mereka tanpa diskriminasi dan represi. Perlunya pengakuan dan dialog yang konstruktif agar demokrasi dapat

berjalan secara nyata dengan menghargai keberagaman bentuk partisipasi politik.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya:

Disarankan agar penelitian lanjutan mengkaji partisipasi politik non-konvensional komunitas punk atau kelompok marginal lainnya di wilayah atau konteks yang berbeda untuk memperkaya pemahaman fenomena ini secara komparatif. Penelitian juga dapat memperluas cakupan metode dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mendapatkan gambaran yang lebih representatif dan holistik.

4. Untuk Akademisi dan Pengajar:

Diharapkan kajian mengenai partisipasi politik non-konvensional dapat lebih banyak dikembangkan dalam kurikulum ilmu sosial dan politik sebagai upaya memahami dinamika politik kontemporer yang lebih inklusif terhadap suara-suara alternatif dan marginal.